

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia dengan adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan tersebut terletak pada pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara berkesimbangan.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Pasal 1 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kompetensi, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai peran yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini sasaran pendidikan adalah untuk dapat menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga pembangunan. Sementara sasaran utama pelaksanaan pendidikan adalah mengharapkan adanya perubahan sikap, tingkah laku individu, kelompok masyarakat kepada yang lebih baik atau perubahan dari yang tidak tahu menjadi paham tentang segala sesuatu.

Sasaran utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yaitu diharapkan dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Pencapaian cita-cita tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan dan pengembangan sekolah yang berkualitas.

Membangun sekolah berkualitas merupakan idaman semua warga sekolah. Parameter sekolah bermutu diukur dari kemampuan sekolah dalam menjaga dan mendinamisasi sekolah sehingga peningkatan kualitas sekolah dapat dicapai dengan optimal. Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah harus dimulai dari peningkatan kompetensi sosial kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi sosial yang baik terimplementasi dari kemampuannya dalam menjalin hubungan sosial dengan segenap stakeholder. Kemampuan kepala sekolah dalam menjalin hubungan sosial tersebut menjadi salah satu kunci dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat formal pendidikan di sekolah.

Secara konsepsional kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Kompetensi sosial yang tinggi sangat penting untuk dimiliki kepala sekolah karena sangat membantu dalam mengatasi kesulitan saat memulai suatu interaksi dengan seseorang atau sebuah kelompok baik kelompok kecil maupun besar. Kompetensi ini dibangun antara lain atas kemampuan inti untuk mengenali perbedaan, secara khusus perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan kehendak. Kompetensi ini memungkinkan orang dewasa mampu memahami

perasaan orang lain. Kompetensi sosial ini sangat memungkinkan kepala sekolah dalam bernegosiasi, mengatasi segala konflik, segala kesalahan, dan situasi yang timbul dalam proses negosiasi.

Terkait dengan adanya konflik di sekolah maka kepala sekolah perlu memiliki kompetensi sosial yang baik dalam menangani konflik. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi sosial dalam menangani konflik ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah berperan sebagai pimpinan yang mampu mengayomi seluruh kepentingan personil sekolah. Selain itu, kepala sekolah perlu memahami bahwa menangani konflik yang berkembang di sekolah merupakan hal yang rumit dan memerlukan kecakapan dan ketelitian dalam menanganinya. Hal ini mengingat bahwa setiap pelaku konflik memiliki pijakan rasional atas setiap konflik yang dihadapi. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menangani secara efektif sehingga setiap pelaku konflik dapat bersikap rasional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam menangani konflik yang terjadi di sekolah dapat berimplikasi terhadap dinamisnya kehidupan di sekolah. Sebaliknya ketidakmampuan kepala sekolah akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan di sekolah serta dapat mempengaruhi kegiatan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Usaha untuk menangani konflik dengan baik, dapat terlaksana jika kepala sekolah memahami substansi konflik yang sedang berkembang, serta cakap untuk menyelesaikannya dalam suasana kekeluargaan. Dalam menangani konflik kepala sekolah perlu memiliki perencanaan yang matang serta pengorganisasian yang baik terhadap setiap konflik yang muncul. Kepala sekolah dapat bertindak sebagai

fasilitator dengan cara mempertemukan pelaku konflik serta mencari solusi yang dapat di terima oleh semua pihak.

Penanganan konflik di sekolah, perlu dilakukan secara hati-hati, oleh karenanya kepala sekolah perlu memfasilitasi dan memediasi dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh konflik yang ada di sekolah dapat diselesaikan secara efektif. Konflik yang terjadi di sekolah merupakan khasanah yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai upaya diminimalisir suatu institusi, sekalipun realitas *stakeholders* masih muncul dua persepsi yang berbeda pandangannya tentang konflik. Konflik bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang akan merugikan sekolah dan akan menghambat pencapaian tujuan sekolah, sehingga konflik merupakan hal yang tabu dan tidak boleh terjadi dalam institusi pendidikan. Sedangkan di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa konflik memiliki nilai yang sangat positif bagi kelangsungan perkembangan sekolah jika dapat di kelola dan didinamisir dengan baik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk dapat menangani konflik dengan baik kepala sekolah perlu memiliki kompetensi sosial yang baik. Penanganan terhadap konflik perlu dilakukan agar seluruh konflik yang muncul dapat diselesaikan tanpa mempengaruhi aktivitas yang berlangsung di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah perlu mengusahakan agar konflik yang terjadi di sekolah tidak berdampak negatif terhadap kemajuan sekolah.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan khususnya pada Sekolah Dasar Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, menunjukkan bahwa

kepala sekolah diduga belum memiliki kompetensi sosial yang tinggi dalam menangani konflik. Realitas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di sekolah pada umumnya disebabkan kurangnya transparansi kepala sekolah, perilaku kepala sekolah yang kurang adil, serta kurangnya kekompakan antara sesama guru dalam bekerja.

Kurangnya transparansi kepala sekolah ditunjukkan dengan kurangnya informasi tentang kebijakan yang diambil kepala sekolah dalam pengembangan mutu. Kepala sekolah cenderung tertutup sehingga tidak semua guru mengetahui perkembangan kebijakan termasuk dana yang digunakan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Kondisi lainnya menunjukkan bahwa kepala sekolah sering memperlakukan guru kurang adil. Beberapa guru diperlakukan istimewa sedangkan guru yang lain kurang diperhatikan karena kurang dekat dengan kepala sekolah. Realitas ini selanjutnya berimplikasi pada kurangnya kekompakan dalam bekerja seperti renggangnya hubungan antara personil sekolah dalam bekerja, guru cenderung memilih teman dalam bekerja dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan karena sebagian guru tidak mau bekerja sama dengan guru yang lain.

Kondisi lainnya menunjukkan bahwa faktor timbulnya konflik adalah kepala sekolah diduga cenderung memperlakukan guru tidak adil baik dalam pembagian tugas maupun dalam pembagian insentif dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya kelompok-kelompok pro dan kontra yang siap menghasut dan sangat rentan memicu konflik di sekolah. Kondisi lainnya pun menunjukkan bahwa guru di sebagian sekolah kurang memiliki kekompakan dalam

bekerja. Masing-masing merasa memiliki kemampuan yang lebih dari guru lain, sehingga cenderung memiliki sikap arogan.

Sementara itu terhadap konflik yang terjadi di sekolah kepala sekolah diduga cenderung memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang konflik dan teknik dalam penanganannya. Kepala sekolah masih memiliki persepsi bahwa konflik tidak boleh terjadi di sekolah sebab di pandang dapat menghambat dinamika dan implementasi program sekolah.

Kepala sekolah pun selalu memberi peringatan kepada guru untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang mengarah pada terjadinya konflik di sekolah. Jika terdapat sesuatu permasalahan yang terjadi dan telah menimbulkan konflik maka kepala sekolah secara agresif mengatasinya dengan teknik yang kontroversi sehingga memicu konflik baru. Kondisi yang seperti ini diduga merupakan manifestasi rendahnya kompetensi sosial kepala sekolah dalam menangani konflik. Untuk pembuktian secara empiris penulis mengkajinya melalui penelitian yang di formulasikan dengan judul: “Kompetensi sosial Kepala Sekolah Dalam Menangani Konflik pada SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan kepala sekolah memahami perilaku orang lain di SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

2. Membangun kerja sama (*teamwork*) antara sesama stakeholder di SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
3. Kemampuan kepala sekolah menjalin komunikasi dengan sesama stakeholder di SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran kemampuan kepala sekolah memahami perilaku orang lain di SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
2. Mengetahui gambaran kemampuan kepala sekolah membangun kerja sama (*teamwork*) antara sesama stakeholder di SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
3. Mengetahui gambaran kemampuan kepala sekolah menjalin komunikasi dengan sesama *stakeholder* di SD Negeri 1 Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi ilmiah kepada kepala sekolah tentang perlunya kompetensi sosial dalam menangani konflik di sekolah.
2. Bagi guru, sebagai bahan informasi kepada guru tentang hakikat konflik yang dapat mendinamisir sekolah sebagai institusi pendidikan
3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam menangani konflik di sekolah melalui upaya menjalin komunikasi yang harmonis dengan semua stakeholder terkait.
4. Bagi peneliti: penelitian ini menjadi salah satu wahana ilmiah dalam mengkaji dan menganalisis masalah kompetensi sosial kepala sekolah dalam menangani konflik.
5. Bagi peneliti lanjutan: bermanfaat terutama untuk ditindaklanjuti melalui pelaksanaan penelitian dengan mengkaji aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalah penanganan konflik di sekolah dasar.